

PERAN WAWASAN SEJARAH SULAWESI TENGGARA DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN MARITIM DI ERA MODERN

Isra Fahriyani¹

fahriyaniisra28@gmail.com¹

Eliyanti Mokodompit²

eliyantiagusmokodompit@uho.ac.id²

^{1,2}Universitas Halu Oleo

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Southeast Sulawesi's historical maritime insight in strengthening Indonesia's maritime resilience in the modern era. Using a literature review approach, this research explores the maritime legacy of the region, particularly the role of the Buton Sultanate within the inter-island sailing and trading networks. The findings indicate that historical values such as customary maritime law, coastal community solidarity, and traditional defense systems have significant potential to be integrated into current maritime resilience strategies. Local maritime historical awareness can reinforce the nation's identity as a maritime people and enhance community participation in safeguarding maritime sovereignty. Therefore, revitalizing local maritime history and culture is a strategic step in supporting Indonesia's development as a sovereign and sustainable maritime nation.

Keywords: *Maritime History, Southeast Sulawesi, Buton Sultanate, Maritime Resilience, National Identity.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran wawasan sejarah Sulawesi Tenggara dalam memperkuat ketahanan maritim Indonesia di era modern. Melalui pendekatan studi literatur, kajian ini menelusuri jejak sejarah maritim wilayah tersebut, khususnya peran Kesultanan Buton dalam jaringan pelayaran dan perdagangan antarpulau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai historis seperti hukum adat laut, solidaritas masyarakat pesisir, dan sistem pertahanan tradisional memiliki potensi besar untuk diintegrasikan ke dalam strategi ketahanan maritim masa kini. Wawasan sejarah maritim lokal dapat memperkuat identitas bangsa sebagai bangsa pelaut serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kedaulatan laut. Oleh karena itu, revitalisasi sejarah dan budaya maritim

daerah menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sejarah Maritim, Sulawesi Tenggara, Kesultanan Buton, Ketahanan Maritim, Identitas Bangsa.

PENDAHULUAN

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki sejarah maritim yang kaya dan mendalam. Kawasan ini sejak dahulu kala telah dikenal sebagai jalur pelayaran dan perdagangan penting di wilayah timur Nusantara. Kerajaan-kerajaan maritim seperti Kesultanan Buton memiliki peran besar dalam membentuk identitas maritim masyarakat setempat. Aktivitas pelayaran, perikanan, dan perdagangan laut menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, warisan sejarah maritim ini menyimpan nilai strategis yang besar bagi masa kini dan masa depan bangsa (Rustam, 2016).

Di tengah tantangan globalisasi dan dinamika geopolitik kawasan Asia-Pasifik, ketahanan maritim menjadi salah satu isu strategis nasional. Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan pendekatan yang menyeluruh dalam menjaga kedaulatan dan keamanan lautnya. Ketahanan maritim tidak hanya soal kekuatan militer laut, tetapi juga mencakup ketangguhan masyarakat pesisir, pengelolaan sumber daya kelautan, serta kesadaran historis dan budaya bahari (Marsetio, 2013). Dalam konteks ini, wawasan sejarah daerah-daerah maritim seperti Sulawesi Tenggara menjadi penting

untuk dijadikan dasar pembentukan karakter dan strategi kebijakan maritim. Sejarah lokal dapat memberi perspektif jangka panjang dalam menghadapi tantangan maritim modern.

Sulawesi Tenggara memiliki jejak sejarah pelayaran dan pertahanan laut yang kaya, terutama melalui peran Kesultanan Buton. Kesultanan ini memiliki sistem hukum adat yang mengatur jalur pelayaran, perlindungan nelayan, dan hubungan dagang antarpulau. Bahkan, Kesultanan Buton dikenal memiliki sistem pertahanan laut yang terorganisir, yang dapat menjadi cerminan kearifan lokal dalam menjaga keamanan maritim. Nilai-nilai lokal tersebut dapat dikaji ulang untuk memperkuat ketahanan maritim kontemporer. Sejarah tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat lokal sejak dahulu telah memiliki kesadaran akan pentingnya keamanan laut (Rustam, 2016).

Namun, wawasan sejarah tersebut sering kali terabaikan dalam pengambilan kebijakan dan pembentukan strategi maritim nasional. Kurangnya integrasi antara pengetahuan historis dan strategi modern menyebabkan ketahanan maritim kita masih terfragmentasi. Banyak generasi muda di wilayah maritim tidak lagi mengenal sejarah daerahnya sendiri, termasuk kontribusi

leluhur mereka dalam menjaga wilayah laut. Kondisi ini berpotensi melemahkan ikatan emosional dan tanggung jawab masyarakat terhadap lautnya sendiri. Padahal, penguatan identitas maritim nasional dapat dimulai dari pengenalan sejarah lokal.

Pendidikan sejarah di daerah maritim seperti Sulawesi Tenggara belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk membangun ketahanan maritim. Kurikulum pendidikan cenderung menitikberatkan pada sejarah nasional secara umum, tanpa menggali nilai-nilai lokal yang relevan dengan konteks daerah (Marsetio, 2013). Padahal, sejarah lokal memiliki kekuatan untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap wilayah laut. Jika generasi muda memahami bahwa nenek moyang mereka adalah pelaut tangguh dan pengelola laut yang bijak, maka akan tumbuh kesadaran kolektif untuk melindungi laut sebagai warisan. Oleh karena itu, integrasi sejarah lokal dalam pendidikan maritim sangat diperlukan.

Selain pendidikan, wawasan sejarah juga dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan daerah. Pemerintah daerah dapat menjadikan nilai-nilai sejarah maritim sebagai dasar pengembangan strategi pembangunan wilayah pesisir dan laut. Penggunaan pendekatan historis ini akan memberi keunikan dan kekuatan kultural dalam program-program pembangunan. Sejarah bukan hanya narasi masa lalu, tetapi dapat menjadi inspirasi untuk membentuk masa depan maritim yang lebih tangguh. Dengan demikian, sejarah Sulawesi Tenggara tidak hanya disimpan di museum, melainkan hidup dalam kebijakan dan tindakan nyata (Sulistiyono, 2018).

Pembangunan ketahanan maritim juga perlu memperhatikan dimensi sosial budaya yang telah lama tertanam dalam masyarakat pesisir. Di Sulawesi Tenggara, budaya pelayaran dan gotong royong masyarakat pesisir merupakan kekayaan yang dapat diberdayakan untuk memperkuat solidaritas dalam menjaga laut. Tradisi-tradisi seperti "mangaru" (kerja bersama di laut) dan ritual laut lainnya mencerminkan keterikatan emosional masyarakat terhadap laut. Nilai-nilai ini dapat digunakan untuk membangun modal sosial dalam pengelolaan maritim yang berkelanjutan. Ketahanan maritim akan lebih kuat jika ditopang oleh kekuatan budaya masyarakat (Rustam, 2016).

Selain itu, wawasan sejarah juga dapat digunakan untuk membangun narasi nasionalisme maritim dari daerah. Sulawesi Tenggara dengan kekayaan sejarahnya dapat menjadi episentrum narasi kebangkitan maritim Indonesia. Dengan mengangkat tokoh-tokoh maritim lokal dan sejarah perlawanan terhadap penjajah di laut, masyarakat akan merasa bangga menjadi bagian dari bangsa pelaut. Narasi ini penting dalam membangun semangat bela negara dan menjaga kedaulatan wilayah laut. Identitas maritim yang kuat dimulai dari pengakuan atas kontribusi daerah terhadap sejarah nasional (Marsetio, 2013).

Ketahanan maritim di era modern juga menghadapi tantangan non-tradisional seperti pencurian ikan, degradasi lingkungan laut, dan konflik batas wilayah laut. Untuk menghadapi tantangan ini, masyarakat perlu dibekali dengan kesadaran historis agar mampu mengambil peran aktif dalam menjaga sumber daya laut. Kesadaran ini bisa diperoleh dengan memahami

bagaimana leluhur mereka menjaga kelestarian laut melalui hukum adat dan aturan pelayaran. Pengetahuan ini kemudian dikombinasikan dengan ilmu dan teknologi modern untuk membentuk sistem pertahanan maritim yang adaptif. Maka sinergi antara wawasan sejarah dan inovasi menjadi kunci utama (Ridho & Nugraha, 2024).

Di era modern ini, wawasan sejarah bukanlah sesuatu yang usang, melainkan sumber kekuatan dan inspirasi. Dalam konteks Sulawesi Tenggara, pelestarian sejarah maritim harus diiringi dengan upaya edukatif, dokumentatif, dan inovatif. Museum, arsip digital, film dokumenter, dan cerita rakyat perlu diangkat kembali dan diperkenalkan secara luas. Pemerintah, akademisi, dan masyarakat harus bekerja sama dalam menggali, merekonstruksi, dan mempopulerkan sejarah maritim daerah. Semakin kuat wawasan sejarah, semakin besar pula kesadaran untuk menjaga laut sebagai bagian dari identitas dan kedaulatan bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*), yaitu metode yang bertumpu pada penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur dipilih karena penelitian ini berfokus pada penelusuran historis dan konseptual yang berkaitan dengan sejarah maritim Sulawesi Tenggara serta relevansinya dalam memperkuat ketahanan maritim Indonesia di era modern. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali wawasan sejarah, budaya, dan strategi maritim dari sumber-sumber

yang telah terdokumentasi secara akademik dan historis.

Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang terdiri dari buku sejarah, artikel ilmiah, jurnal akademik, prosiding seminar, naskah kuno, dokumen arsip, serta laporan kebijakan terkait maritim dan kebudayaan Sulawesi Tenggara. Peneliti juga menggunakan sumber dari lembaga resmi seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta lembaga penelitian daerah seperti Balai Pelestarian Kebudayaan dan Museum Keraton Buton. Kelayakan dan kredibilitas sumber menjadi acuan utama dalam proses seleksi literatur.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis literatur dengan bantuan database digital seperti Google Scholar, Garuda, DOAJ, dan repository kampus, serta literatur cetak dari perpustakaan universitas dan lembaga kebudayaan. Proses ini mencakup identifikasi topik, seleksi sumber berdasarkan relevansi, serta pencatatan kutipan penting yang mendukung pembahasan. Peneliti juga memperhatikan tahun terbit dan kualitas akademik dari masing-masing sumber untuk menjaga mutu data yang dikaji (Sugiyono, 2018).

Prosedur analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi tematik. Data yang telah dikumpulkan disusun berdasarkan tema utama seperti: (1) sejarah maritim Sulawesi Tenggara; (2) nilai-nilai budaya kelautan lokal; (3) konsep ketahanan maritim modern; dan (4) potensi integrasi wawasan sejarah dalam strategi maritim nasional. Setiap tema dianalisis secara deskriptif dan

kritis untuk memahami hubungan antara sejarah lokal dan kebutuhan kontemporer ketahanan maritim.

Validitas data dijaga dengan menggunakan triangulasi sumber pustaka, yakni membandingkan informasi dari berbagai referensi yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data. Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan *critical review* terhadap sumber-sumber yang dianalisis, guna menilai kedalaman argumen, keabsahan data sejarah, serta keterkaitan antara temuan literatur dengan konteks modern. Proses ini membantu menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Dengan pendekatan studi literatur ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya kajian tentang peran sejarah lokal dalam ketahanan maritim nasional. Selain itu, hasil penelitian juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menggali potensi sejarah sebagai bagian dari strategi pertahanan dan pembangunan maritim di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Maritim Sulawesi Tenggara dalam Konteks Nusantara

Sulawesi Tenggara memiliki sejarah maritim yang panjang dan kuat, terutama melalui Kesultanan Buton yang dikenal sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar di kawasan timur Indonesia. Letak geografisnya yang strategis di jalur pelayaran antara Maluku dan Sulawesi menjadikan wilayah ini sebagai simpul penting dalam jaringan perdagangan

antarwilayah. Keberadaan pelabuhan-pelabuhan tradisional serta sistem pelayaran lokal memperlihatkan bahwa masyarakat Sulawesi Tenggara telah lama menjalin hubungan ekonomi dan budaya melalui laut. Seperti dikemukakan oleh Sulistiyono (2016), posisi geostrategis seperti ini turut membentuk karakter bangsa sebagai pelaut dan pedagang yang aktif (Marsetio, 2013).

Dalam lintasan sejarah Nusantara, aktivitas maritim bukanlah hal yang sekunder, melainkan inti dari pembentukan identitas politik dan ekonomi bangsa. Sebagaimana kerajaan Sriwijaya dan Majapahit berhasil membangun kekuasaan berbasis pelayaran dan perdagangan, masyarakat Sulawesi Tenggara pun telah menunjukkan pola hidup yang serupa. Kegiatan pelayaran antar pulau, pemanfaatan angin muson, dan perdagangan hasil laut merupakan praktik yang membudaya. Ini membuktikan bahwa Sulawesi Tenggara bukan hanya terlibat dalam kegiatan lokal, tetapi juga bagian dari jaringan dagang internasional sejak era pramodern (Sulistiyono, 2018).

Diaspora budaya dan pengaruh eksternal dari perdagangan juga memperkaya nilai-nilai kemaritiman masyarakat Sulawesi Tenggara. Akulturasi budaya Islam dari para pedagang Arab dan Gujarat memperkuat struktur sosial Kesultanan Buton dan menjadikan agama sebagai unsur penguat jaringan dagang dan politik. Hal ini selaras dengan fenomena munculnya kerajaan-kerajaan maritim Islam di Nusantara yang dijelaskan oleh Sulistiyono (2016) sebagai bagian dari dinamika perdagangan internasional. Wawasan ini menunjukkan betapa eratny keterkaitan antara sejarah lokal dan konteks maritim global (Sulistiyono, 2018).

Kesultanan Buton memiliki struktur politik dan hukum adat yang mampu mengatur aktivitas kelautan, termasuk tata niaga, hukum pelayaran, dan pertahanan laut. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat pesisir tidak hanya terlibat dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga menciptakan sistem maritim yang berdaulat. Seperti halnya Sriwijaya yang menjaga jalur perdagangannya dari bajak laut, masyarakat Buton memiliki sistem keamanan laut berbasis tradisi. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan maritim bukan hal baru, melainkan telah menjadi bagian dari warisan sejarah yang layak dihidupkan kembali (Marsetio, 2013).

Nilai-nilai historis seperti keberanian melaut, semangat gotong royong, dan pengetahuan tentang navigasi tradisional adalah kekuatan kultural yang dapat diaktualisasikan di era modern. Sayangnya, sebagaimana dikritisi oleh Sulistiyono, paradigma negara maritim Indonesia sering kali gagal membangun strategi berdasarkan akar historis yang kuat. Banyak kebijakan bersifat sektoral, tidak mempertimbangkan konteks sosial-budaya lokal. Padahal, Sulawesi Tenggara telah menunjukkan potensi besar sebagai wilayah yang memiliki modal sosial dan historis untuk memperkuat ketahanan maritim nasional.

Wawasan sejarah daerah seperti Sulawesi Tenggara bisa menjadi basis untuk membangun paradigma baru dalam pendidikan dan kebijakan maritim. Pelajaran sejarah lokal seharusnya tidak hanya diajarkan sebagai fakta masa lalu, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan karakter dan identitas bangsa. Menurut Sulistiyono (2016), cara pandang maritim (wawasan bahari) harus meliputi dimensi kognitif, afektif, dan konatif. Dalam hal ini,

sejarah Sulawesi Tenggara dapat memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya laut sebagai aset utama bangsa (Sulistiyono, 2018).

Dalam konteks geopolitik modern, keberadaan Sulawesi Tenggara menjadi sangat strategis. Wilayah ini menjadi titik temu antara ALKI II dan jalur logistik regional yang krusial bagi pertahanan laut Indonesia. Jika sejarah maritim daerah ini dipahami dan dikuatkan dalam pendidikan serta perencanaan wilayah, maka dapat memberikan sumbangsih nyata dalam ketahanan nasional. Oleh karena itu, pelestarian dan pemaknaan ulang terhadap sejarah maritim lokal sangat dibutuhkan dalam mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Revitalisasi sejarah maritim Sulawesi Tenggara bukan hanya soal kebanggaan identitas, tetapi juga soal perencanaan strategis jangka panjang. Nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan laut, tata pelayaran, dan solidaritas masyarakat pesisir dapat dijadikan model dalam pembangunan sistem pertahanan maritim berbasis komunitas. Pendekatan seperti ini, sebagaimana disarankan oleh Sulistiyono, harus menjadi bagian dari upaya membangun negara maritim yang sejati—berlandaskan sejarah, didukung oleh kebijakan, dan digerakkan oleh masyarakat.

Integrasi Nilai Historis ke dalam Ketahanan Maritim Modern

Ketahanan maritim modern tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer laut, tetapi juga oleh kemampuan bangsa dalam mengelola laut secara berkelanjutan dan berbasis pada nilai-nilai budaya lokal. Dalam konteks ini, nilai historis yang

tertanam di masyarakat Sulawesi Tenggara dapat diintegrasikan ke dalam sistem pertahanan dan pengelolaan maritim nasional. Menurut Sulistiyono (2016), pembangunan maritim harus mencerminkan jati diri bangsa dan tidak bersifat artifisial. Oleh karena itu, sejarah lokal dapat dijadikan fondasi untuk menciptakan sistem ketahanan yang adaptif dan kontekstual (Muhammad Sajidin et al., 2023).

Salah satu bentuk integrasi nilai historis adalah penguatan identitas maritim di tengah masyarakat. Masyarakat Sulawesi Tenggara memiliki identitas kuat sebagai pelaut dan penjaga laut sejak zaman Kesultanan Buton. Identitas ini bisa menjadi modal sosial untuk membangun kesadaran bela negara dalam konteks kelautan. Seperti yang dicontohkan dalam keberhasilan Sriwijaya dan Majapahit, kekuatan maritim terletak pada sinergi antara kekuatan masyarakat dan pemerintah. Maka dari itu, pelibatan komunitas lokal dalam menjaga wilayah laut sangat penting untuk menciptakan pertahanan yang partisipatif (Muhammad Sajidin et al., 2023).

Revitalisasi nilai sejarah juga dapat dilakukan melalui pendidikan maritim berbasis lokal. Kurikulum sekolah-sekolah di Sulawesi Tenggara dapat memuat sejarah lokal maritim agar siswa sejak dini memahami dan bangga terhadap warisan budaya mereka. Hal ini akan membentuk sikap afektif yang kuat terhadap laut sebagai ruang hidup dan sumber daya strategis. Sebagaimana dikemukakan Sulistiyono (2016), cara pandang terhadap diri dan lingkungan sebagai bangsa maritim perlu diinternalisasi secara sistematis dalam pendidikan dan media (Sulistiyono, 2018).

Di sisi lain, integrasi nilai historis juga penting dalam perumusan kebijakan publik,

baik di tingkat daerah maupun nasional. Pemerintah daerah Sulawesi Tenggara perlu menjadikan sejarah maritim sebagai bagian dari perencanaan wilayah dan program pembangunan pesisir. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengelola laut. Sebab, kebijakan yang berakar pada sejarah dan budaya akan lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal.

Dalam bidang ekonomi, nilai-nilai historis juga dapat mendorong pengembangan potensi kelautan daerah secara berkelanjutan. Misalnya, praktik-praktik tradisional dalam pengelolaan perikanan atau pelayaran yang diwariskan secara turun-temurun dapat dijadikan model konservasi berbasis komunitas. Seperti halnya pada masa kerajaan-kerajaan maritim, ekonomi laut bukan hanya soal eksploitasi sumber daya, tetapi juga tentang keberlanjutan dan keseimbangan. Pendekatan historis dapat membantu menghindari praktik ekonomi destruktif yang merugikan ekosistem laut.

Wawasan sejarah juga memberi inspirasi dalam membangun sistem transportasi laut dan perdagangan antarwilayah yang efisien. Dahulu, kapal-kapal tradisional di Sulawesi Tenggara berperan dalam menghubungkan berbagai pulau dan menjadi penggerak ekonomi. Dalam era modern, sistem logistik laut dapat dikembangkan dengan prinsip yang sama, namun dengan teknologi yang lebih maju. Semangat konektivitas dan solidaritas antarwilayah dapat dijadikan fondasi integrasi ekonomi nasional melalui jalur laut (Sulistiyono, 2018).

Ketahanan maritim modern juga membutuhkan dukungan teknologi dan

pertahanan yang kuat, namun harus tetap mempertimbangkan nilai lokal. Misalnya, teknologi pemantauan laut dapat dikombinasikan dengan sistem pengawasan komunitas berbasis kearifan lokal. Konsep pertahanan semesta dalam konteks laut akan lebih efektif jika masyarakat memiliki pemahaman historis atas pentingnya wilayah laut mereka. Sebagaimana dicontohkan Sriwijaya dan Majapahit, keberhasilan mereka adalah kombinasi antara kekuatan senjata dan dukungan rakyat.

Dengan demikian, integrasi nilai sejarah maritim Sulawesi Tenggara dalam sistem ketahanan nasional merupakan langkah strategis. Sejarah bukan sekadar narasi masa lalu, tetapi peta arah bagi pembangunan masa depan. Dalam hal ini, revitalisasi nilai-nilai sejarah bukan hanya bermanfaat untuk pelestarian budaya, tetapi juga untuk ketahanan, kemandirian, dan kesejahteraan bangsa. Perpaduan antara sejarah, teknologi, dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat akan menciptakan ketahanan maritim yang kokoh dan berkelanjutan.

Strategi Penguatan Ketahanan Maritim Berbasis Kultural dan Pendidikan

Penguatan ketahanan maritim di era modern tidak dapat dilepaskan dari pendekatan budaya dan pendidikan. Strategi ini sangat relevan di Sulawesi Tenggara yang memiliki kekayaan budaya maritim yang masih hidup hingga kini. Tradisi pelayaran, hukum adat laut, serta upacara-upacara ritual laut merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat yang bisa diberdayakan untuk memperkuat keterikatan mereka pada laut. Menurut Sulistiyono (2016), paradigma maritim harus mencakup

aspek sosial-budaya sebagai bagian integral dari pembangunan nasional (Sulistiyono, 2018).

Langkah awal dalam strategi ini adalah pelestarian budaya maritim lokal. Pemerintah daerah perlu mendokumentasikan dan menghidupkan kembali tradisi-tradisi kelautan, seperti cerita rakyat, seni pelayaran, dan sistem kepercayaan terkait laut. Tradisi semacam ini mengandung pesan moral dan etika dalam mengelola sumber daya laut secara bijaksana. Dengan menjadikan budaya sebagai pilar, ketahanan maritim dapat tumbuh dari kesadaran kolektif, bukan semata karena regulasi formal (Muhammad Sajidin et al., 2023).

Pendidikan juga berperan sentral dalam membangun karakter bangsa maritim. Sekolah-sekolah di wilayah pesisir dapat menjadi pusat pendidikan maritim berbasis lokal, yang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga praktik langsung seperti navigasi, konservasi laut, dan kewirausahaan berbasis sumber daya laut. Kurikulum berbasis sejarah dan budaya maritim akan membentuk generasi muda yang memahami dan mencintai laut. Pendidikan semacam ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya manusia dalam sistem ketahanan maritim.

Keterlibatan perguruan tinggi juga sangat strategis. Universitas di Sulawesi Tenggara, misalnya, dapat mengembangkan pusat kajian sejarah maritim serta melakukan riset untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan maritim lokal. Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan kelautan daerah. Sejalan dengan itu, penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan-pelatihan

berbasis tradisi dan teknologi modern akan membangun kemandirian dalam menjaga laut (Muhammad Sajidin et al., 2023).

Program pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis budaya juga perlu dikembangkan secara terarah. Pemerintah dan LSM dapat bekerja sama dalam membentuk kelompok sadar maritim (pokdarwis bahari), koperasi nelayan berbasis adat, atau komunitas pelestari warisan budaya laut. Dengan pendekatan partisipatif ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi pelaku utama dalam pembangunan maritim. Strategi ini terbukti lebih efektif karena bertumpu pada kekuatan internal masyarakat.

Media massa dan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk kampanye kebudayaan maritim. Film dokumenter, podcast sejarah maritim lokal, hingga media sosial bisa menjadi sarana edukasi publik. Generasi muda yang akrab dengan teknologi digital dapat dijangkau melalui narasi sejarah yang dikemas secara menarik. Hal ini akan memperkuat kembali ikatan emosional antara masyarakat dan lautnya di tengah gempuran budaya global.

Sinergi antara pendidikan, budaya, dan kebijakan akan menciptakan sistem ketahanan maritim yang holistik. Strategi berbasis kultural tidak meniadakan pendekatan teknokratik, melainkan menjadi penyeimbang agar kebijakan lebih membumi. Seperti yang disampaikan oleh Sulistiyono (2016), pembangunan negara maritim tidak bisa dilakukan dengan cara parsial dan sektoral, tetapi harus melalui pendekatan integral yang menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Di sinilah nilai sejarah dan budaya menemukan peran strategisnya.

Sebagai penutup, Sulawesi Tenggara memiliki peluang besar untuk menjadi model pengembangan ketahanan maritim berbasis sejarah dan budaya. Dengan menggali kekayaan masa lalu, menghidupkan kembali tradisi, dan mengintegrasikannya dalam sistem pendidikan serta kebijakan publik, wilayah ini dapat membangun ketahanan maritim yang berakar kuat. Jika strategi ini diadopsi secara nasional, maka Indonesia tidak hanya akan menjadi negara kepulauan, tetapi negara laut yang sejati—kuat secara budaya, tangguh secara ekonomi, dan berdaulat secara politik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki jejak sejarah maritim yang kuat, terutama melalui peran Kesultanan Buton sebagai kerajaan maritim yang berpengaruh di wilayah timur Indonesia. Sejarah ini memperlihatkan bahwa masyarakat Sulawesi Tenggara sejak lama telah menjadikan laut sebagai ruang hidup, sumber ekonomi, dan jalur diplomasi. Nilai-nilai seperti keberanian melaut, solidaritas sosial, sistem hukum laut, dan keterampilan navigasi merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki potensi besar untuk diaktualisasikan dalam memperkuat ketahanan maritim nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Marsetio. (2013). Strategi TNI Angkatan Laut dalam pengamanan batas maritim NKRI: kajian historis-strategis. *Citra Lekha*, 17(1), 1-18-18.
- Muhammad Sajidin, Inggar Saputra, & Wida Nofiasari. (2023). Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam

- Menghadapi Ancaman Kejahatan Transnasional Di Asia Tenggara. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(3), 170–177. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i3.476>
- Ridho, A. F., & Nugraha, I. F. (2024). Praktik Massompek Sebagai Prinsip Penyebaran dan Ketahanan Diaspora Bugis di Wilayah Maritim Indonesia-Malaysia. *Student Research Journal*, 2(6).
- Rustam, I. (2016). Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Indonesian Perspective*, 1(1), 1–21. <https://doi.org/10.14710/ip.v1i1.10426>
- Sugiyono. (2018). *metode penelitian kuantitatif, - kualitatif dan r & d*. Alfabeta.
- Sulistiyono, S. T. (2018). Paradigma Maritim dalam Membangun Indonesia: Belajar dari Sejarah. *Lembaran Sejarah*, 12(2), 81. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.33461>